

RESOLUSI JIHAD NU 1945 : PERAN ULAMA DAN SANTRI DALAM MEMPERTAHAKAN KEMERDEKAAN NKRI

Oleh:

Heriyanto
(12407141010)

Abstrak

Proklamasi 17 Agustus 1945 merupakan pengakuan kepada seluruh dunia bahwa telah lahir sebuah negara baru yang diberi nama Indonesia. Dengan di proklamirkannya kemerdekaan Indonesia bukan berarti negara ini sudah bersih dari penjajahan. Datangnya tentara sekutu setelah kemerdekaan membuat kondisi Indonesia menjadi terganggu, apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa NICA turut membocongi ke dalam tentara sekutu. NICA inilah yang menjadi gangguan terbesar Indonesia karena merekalah yang masih ingin menguasai Indonesia. NICA atau pemerintah bentukan Belanda kembali ke Indonesia dasar utamanya masih bersifat ekonomi, Belanda menganggap bahwa Indonesia tidak akan hidup jika tidak ada Belanda maka dari alasan itulah Belanda kembali untuk menguasai Indonesia. Kedatangan sekutu dan NICA kemudian mengundang bentrokan di berbagai daerah termasuk di Surabaya. Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar waktu itu juga turut khawatir dengan keadaan Indonesia, maka untuk mengatasi hal tersebut para petinggi NU segera memanggil para konsul NU untuk menentukan sikap menghadapi aksi yang dilakukan NICA yang membonceng Inggris. Pertemuan para konsul berlangsung dua hari, 21-22 Oktober 1945, di kantor PBNU di Bubutan, Surabaya. Selain dihadiri para konsul NU se-Jawa dan Madura, pertemuan juga dihadiri Panglima Hizbullah, Zainul Arifin. Rapat kemudian menghasilkan satu keputusan dalam bentuk resolusi, yang kemudian diberi nama Resolusi Jihad. Resolusi Jihad ini mewakili sikap sebagian besar bangsa Indonesia, bahwa tindakan NICA dan Inggris merupakan tindakan yang telah melanggar kedaulatan negara dan agama, maka dalam keadaan seperti ini umat Islam memiliki kewajiban untuk melakukan pembelaan. Kewajiban melakukan pembelaan ini dilakukan para ulama dan santri dengan jihad fi sabilillah. Hal tersebut sesuai dengan hukum yang terkandung dalam resolusi jihad yang mengharuskan setiap orang untuk berperang dan sifat perang tersebut adalah jihad fisabilillah.

Kata Kunci: Resolusi Jihad, NU, Surabaya, Ulama dan Santri

NU Jihad Resolution 1945: The Role of Ulama and Santri in Maintaining The Independence of The Republic of Indonesia

By:

Heriyanto
(12407141010)

Abstract

Proclamation of 17 August 1945 is an acknowledgment to the whole world that has born a new country named Indonesia. The proclamation of Indonesian independence does not mean that this country is free from colonialism. The arrival of the allied forces after the independence of Indonesia made a condition be interrupted, especially coupled with the fact that the NICA participated in the allied forces. NICA which is the biggest upsets Indonesia because they still want to dominate Indonesia. NICA or a government formed by the Dutch returned to Indonesia main base is still primarily economic, the Netherlands considers that Indonesia will not survive if there is no reason why the Dutch then from the Netherlands back to dominate Indonesia. Arrival allies and NICA then invite many clashes in various areas including in Surabaya. Nahdlatul Ulama Islamic organization The time it also concerned with the state of Indonesia, then to overcome these officials immediately called the consuls NU her to determine the attitude of the face of the action by participating in the NICA British troops. Consuls meeting lasted two days, 21 to 22 October 1945, at the NU headquarters in Bubutan, Surabaya. In addition to the consuls attended NU Java and Madura, the meeting was also attended by the Commander of Hezbollah, Zainul Arifin. The meeting then resulted in a decision in the form of a resolution, which was then given the name of Jihad resolution. Jihad resolution represents the attitude of the majority of the Indonesian people, that action NICA and English is an action that has violated the sovereignty of the state and religion, then in such circumstances Muslims have a duty to defend. The obligation to make this defense is done ulama and santri with jihad fi sabilillah. This is in accordance with the laws contained in the resolution of jihad that requires everyone to go to war and the nature of the war is a jihad fi sabilillah.

Keywords: NU Jihad Resolution, Surabaya, Ulama and Santri

A. Pendahuluan

Kedatangan pasukan sekutu (Allied Forces Nederlands East Indies) atau AFNEI setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, membuat kondisi pemerintah Indonesia terganggu. Hal ini karena keberadaan pasukan pemerintah sipil Hindia Belanda (Netherlands Indies Civil Administration) atau NICA yang turut membonceng dalam pasukan sekutu.

Di Surabaya sendiri kedatangan pasukan sekutu yang berintikan pasukan Inggris, mendapatkan reaksi yang hebat dari masyarakat setempat. Rakyat dengan seluruh lapisan golongannya menyatakan siap melakukan pertarungan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan negara. Pembelaan negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan kekuatan seluruh rakyat Surabaya termasuk para ulama dan santri yang ada di seluruh Pondok Pesantren, akhirnya membentuk kumpulan masa untuk melawan pihak sekutu dan NICA.

Nahdlatul Ulama' sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang terbesar di Indonesia, juga tanggap

terhadap kondisi kedaulatan negara yang terancam. Kantor Pusat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) yang waktu itu berada di Jalan Bubutan IV Surabaya menjadi sangat rentan terhadap ancaman akibat datangnya pasukan asing di Surabaya. Hal ini diperparah dengan perilaku pasukan asing yang menyinggung perasaan umat Islam, hingga akhirnya, Rois Akbar Hadrotus Syeh K.H. Hasyim Asy'ary membacakan sendiri hasil keputusan dan tanggapan organisasi Nahdlatul Ulama' terhadap kondisi bangsa dan negara, yaitu Resolusi Jihad. Resolusi yang dibacakan pada tanggal 22 Oktober 1945 ini berisi pernyataan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan hukumnya adalah wajib 'Ain bagi umat Islam, dan perang mempertahankan kemerdekaan adalah perang suci (jihad fi sabilillah).

Kabar munculnya Resolusi Jihad menjadikan masyarakat Surabaya terbakar semangat untuk ikut berjuang melawan penjajah. Akhirnya dalam tempo yang singkat seruan jihad untuk melawan penjajah meluas keluar Surabaya dan akhirnya sampai kepada para ulama dan santri. Mereka yang

mengetahui kabar tersebut langsung bergerak ikut berjuang melawan pasukan sekutu yang masuk ke Indonesia. Para ulama dan santri kemudian berjuang dengan gigih dan tanpa rasa takut untuk menghadapi pasukan sekutu yang waktu itu datang dengan perlengkapan dan senjata yang modern. Mereka ini tidak takut ataupun gentar walaupun taruhannya adalah nyawa mereka, hal ini demi mempertahankan kemerdekaan NKRI agar tidak jatuh ketangan para penjajah.

B. Awal Kemunculan Resolusi Jihad NU

Serentetan penyerangan yang dilakukan oleh sekutu kepada Jepang mengakibatkan pihak Jepang harus menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Sebagai pemenang perang, sekutu memerintahkan agar Jepang tetap menjaga status quo, hal ini berarti tidak boleh ada perubahan atau gejolak-gejolak baru yang terjadi di wilayah-wilayah pendudukan, baik bersifat politis maupun militer di daerah bekas jajahannya. Selain mempertahankan status quo pihak Jepang yang menyerah juga mendapat mandat dari

sekutu diantaranya bahwa pasukan Jepang tetap berada ditempatnya masing-masing, menunggu sampai pasukan sekutu datang untuk mengambilalih kekuasaanya, dan selama belum penandatanganan penyerahan Jepang secara resmi, semua komandan pasukan Sekutu yang ada di bawah komando Jenderal MacArthur dilarang berhubungan terlebih dulu secara langsung dengan pasukan Jepang.¹

Pasukan sekutu tiba di Indonesia pada tanggal 8 September 1945, pasukan ini adalah pasukan AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies). Pasukan AFNEI merupakan bawahan dari SEAC (Inggris). Pasukan ini di pimpin oleh Mayor Geenhalgh dan bertugas mencari tahu keadaan Indonesia waktu itu untuk kemudian mempersiapkan markas AFNEI di Jakarta. Bagi pihak sekutu, satu masalah yang harus diutamakan dan harus segera dilaksanakan oleh pasukan Jepang di wilayah pendudukannya, adalah menyelamatkan para interniran dan

¹R.H.A Saleh, Mari Bung, Rebut Kembali, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), hlm. 22.

tawanan perang yang selama perang disekap Jepang dalam berbagai kamp. Para tawanan ini disebut Allied Prisoners of War and Internees (APWI). Perintah sekutu kepada Jepang untuk "menyelamatkan" berarti para tawanan itu harus segera dibebaskan dari status tahanannya, dijaga keselamatannya, dan mendapatkan perawatan lebih baik.²

Pada tanggal 29 September di bawah komando Jenderal Philips Christison pasukan sekutu gelombang kedua datang ke Indonesia, waktu itu pasukan sekutu menggunakan kapal perang Cumberland dan mendarat di Tanjung Priok. Kedatangan pasukan sekutu atau AFNEI awalnya disambut baik (netral) oleh para pemimpin Indonesia dengan melihat pada tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Pasukan sekutu yang tiba di Indonesia terdiri dari tiga pasukan yaitu:

1. Divisi India ke-23, di bawah pimpinan Jenderal Mayor D.C. Hawthorn, mendarat di Jakarta.
2. Divisi India ke-5, di bawah pimpinan Mayor Jendral E.C.

² Ibid.

Mansergh untuk daerah Jawa Timur, mendarat di Surabaya.

3. Divisi India ke-26, di bawah pimpinan Mayor Jendral H.M. Chambers untuk daerah Sumatera, mendarat di Medan dan Padang.³

Setelah mengetahui dalam rombongan AFNEI itu terdapat NICA (Netherlands-Indies Civil Administration) maka pihak Indonesia mulai curiga dan meragukan maksud kedatangan misi AFNEI. Kecurigaan ini muncul disebabkan NICA adalah aparatur sipil pemerintah Hindia-Belanda yang dipersiapkan untuk mengambilalih dan menegakkan kembali pemerintah atas wilayah Indoensia. Kecurigaan pun semakin bertambah ketika pihak NICA mulai melakukan aksi-aksi yang membahayakan seperti mempersenjatai orang-orang KNIL yang baru lepas dari tawanan Jepang.⁴

³Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarahwan Tebuireng, *Resolusi Jihad Perjuangan Ulama: dari Menegakkan Agama Hingga Negara*, (Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2015), hlm. 139.

⁴Zainul Milal Bizawie, *Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-*

Penyusupan tentara NICA ke dalam pasukan Inggris dilakukan dengan cara menyamar yakni dengan memulas warna kulit tentara NICA sehingga menyerupai warna kulit serdadu Gurkha. Pemulasan warna kulit ini diketahui antara lain dari bangkai mereka yang terlempar di sungai Brantas ketika berkobar pertempuran Surabaya di bulan November. Di samping itu memang ada sejumlah perwira Belanda yang diterjunkan sebagai perintis masuknya pasukan sekutu dengan menggunakan seragam sekutu.⁵

Belanda ingin kembali ke Indonesia dasar utama masih bersifat ekonomis, yaitu masih menganggap bahwa Belanda tanpa Indonesia tak mungkin bertahan hidup (Indonesia masih diibaratkan gabus raksasa di mana Belanda bisa terapung). Tetapi supaya tindakannya menduduki kembali Indonesia dibenarkan menurut hukum internasional maka Belanda

1949), (Jakarta: Pustaka Kompas, 2014), hlm. 195-196.

⁵ G. Moedjanto, Sejarah Indonesia Abad ke-20 dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati, Jilid I, (Yogyakarta: Penerebit Kanisius, 1974), hlm. 100.

menyatakan bahwa Indonesia bukan lagi koloni, melainkan wilayahnya yang sejajar dengan wilayah Belanda dan Eropa. Pengakuan bahwa Indonesia adalah wilayah kerajaan Belanda di seberang diterima oleh dunia internasional. Juga sesudah Perang Dunia II selesai pengakuan itu masih berlaku seperti terbukti dalam konferensi Postdam.⁶

C. Resolusi Jihad

Keadaan mulai berubah ketika Sekutu dan NICA masuk ke Surabaya pada bulan September 1945. Para pejuang Surabaya yang memiliki kesamaan pandangan bahwa kemerdekaan yang baru saja diperoleh mendapat ancaman karena kedatangan pasukan sekutu dan NICA, kemudian segera mengambil cara apapun untuk menghilangkan ancaman itu meski harus berhadapan dengan pasukan sekutu (Inggris) yang secara kemiliteran sangat kuat.⁷

Di sisi lain, sikap pasukan Belanda (NICA) yang menebarkan

⁶ Ibid., hlm. 99.

⁷Zainul Milal Bizawie, op.cit., hlm. 99.

ancaman dan menuntut agar kendali penguasaan kota dikembalikan kepada mereka, serta menunjukkan sikap mengejek kemerdekaan Indonesia, terlihat jelas di hadapan penduduk Surabaya, yakni ketika Belanda meminta kepada pimpinan Surabaya untuk mengibarkan bendera Tri-warna (bendera Belanda) guna merayakan hari kelahiran Ratu Wilhelmina. Permintaan Belanda tersebut tentu saja dinilai rakyat Surabaya secara khusus dan masyarakat Indonesia secara umum adalah sebuah ancaman yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Para pejuang Surabaya kemudian mengatasi ancaman tersebut dengan berupaya mendapatkan persenjataan dari markas-markas Jepang. Perebutan senjata di Surabaya cukup mudah karena Perwira Senior Angkatan Laut Jepang, Laksamana Madya Shibata, memerintahkan pasukannya agar membuka gudang senjata dan membiarkan para pejuang mengambil senjata-senjata pada 1 Oktober 1945.⁸

Bentrokan antara pemuda Surabaya dengan pihak Belanda akhirnya terjadi pada 19 September

1945, hal ini terjadi karena pengibaran bendera Belanda di Hotel Oranje. Setelah insiden di Hotel Oranje tersebut, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 1945 meletuslah pertempuran pertama antara Indonesia melawan tentara Inggris. Serangan-serangan kecil tersebut di kemudian hari berubah menjadi serangan umum yang banyak memakan korban jiwa di kedua belah pihak, Indonesia dan Inggris, sebelum akhirnya Jenderal D.C. Hawthorn meminta bantuan Presiden Sukarno untuk meredakan situasi.

Melihat kondisi Surabaya yang semakin mencekam dengan semakin meningkatnya aktivitas pasukan Inggris, kemudian menjadi pertimbangan bagi para kyai NU untuk segera bertindak guna membangkitkan dan mengobarkan semangat perlawanan terhadap Inggris. Langkah pertama yang dilakukan pengurus NU adalah segera memanggil para konsul NU untuk menentukan sikap menghadapi aksi yang dilakukan NICA yang membonceng Inggris.⁹

⁸ Ibid., hlm. 201.

⁹Zainul Milal Bizawie, op.cit., hlm. 206.

Pertemuan para konsul berlangsung dua hari, 21-22 Oktober 1945, di kantor PBNU di Bubutan, Surabaya. Selain dihadiri para konsul NU se-Jawa dan Madura, pertemuan juga dihadiri Panglima Hizbullah, Zainul Arifin. Terdapat perbedaan mengenai siapa yang memimpin rapat konsul NU itu. Hasyim Latief, seorang yang terlibat langsung dalam pertempuran Surabaya, menyatakan yang memimpin rapat adalah K.H. Wahab Hasbullah. Sementara beberapa sumber menyebutkan K.H. Hasyim Asy'ari yang memimpin rapat penting itu.¹⁰ Rapat didahului penyajian amanat K.H. Hasyim Asy'ari tentang landasan hukum Islam berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam pria maupun wanita dalam jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsanya. Rapat kemudian menghasilkan satu keputusan dalam bentuk resolusi, yang kemudian diberi nama Resolusi Jihad.

Adapun isi dari pernyataan Resolusi Jihad adalah sebagai berikut:

Resoloesi N.U. Tentang
Djihad fi Sabilillah

¹⁰Ibid.

Bismillahirrochmanir Rochim

Resoloesi:

Rapat besar wakil-wakil Daerah (Konsul 2) Perhimpoean Nahdlatoeel Oelama seluruh Djawa-Madura pada tanggal 21-22 Oktober 1945 di Surabaya.

Mendengar:

Bahwa di tiap2 Daerah di seluruh Djawa-Madura ternyata betapa besarnya hasrat Ummat Islam dan Alim Oelama di tempatnya masing2 untuk mempertahankan dan menegakkan AGAMA, KEDAULATAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MERDEKA.

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai kewajiban bagi tiap2 orang Islam.
- b. Bahwa di Indonesia warga Negaranya adalah sebagian besar terdiri dan Umat Islam.

Mengingat:

- a. Bahwa oleh pihak Belanda (NICA) dan Djepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali didjalankan kedjahatan dan kekedjaman jang mengganggu ketentrman umum.
- b. Bahwa semua jang dilakukan oleh mereka itu dengan maksud melanggar Kedaulatan Negara Republik Indonesia dan Agama, dan ingin kembali mendjadjah di sini maka di beberapa tempat telah terdjadi pertempuran jang

- mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia.
- c. Bahwa pertempuran² itu sebagian besar telah dilakukan oleh Umat Islam yang merasa wajib menurut Agamanya untuk mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanya.
 - d. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian² itu perlu mendapat perintah dan tuntunan yang nyata dari Pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian² tersebut.

Memutuskan:

1. Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha usaha yang akan membahayakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki—tangannya.
2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat “sabilillah” untuk tegaknya Negara Republik

Indonesia Merdeka dan Agama Islam.

Surabaya, 22-10-1945

HB. NAHDLATOEL OELAMA¹¹

Hasil keputusan rapat yang

dikenal dengan nama Resolusi Jihad, kemudian dibacakan sendiri secara

langsung oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Resolusi Jihad ini menjadi pegangan bagi kalangan Islam dalam melakukan perjuangan menghadapi NICA dan pasukan Inggris. Konsul-konsul yang hadir dalam pertemuan di Bubutan itu juga memiliki tugas dan amanah untuk menyebarkan resolusi ini kepada umat Islam di daerahnya masing-masing. Salinan keputusan Resolusi Jihad ini juga dikirimkan kepada Presiden Soekarno, pimpinan Angkatan Perang Indonesia, dan kepada Markas Tinggi Hizbullah dan Sabilillah.¹²

Salinan hasil rapat yang berupa Resolusi Jihad kemudian dimuat secara tertulis dalam Kedaulatan Rakyat, Yogyakarta, tanggal 26 Oktober 1945 tertulis “Toentoetan Nahdlatoel Oelama kepada Pemerintah Repoeblik Soepaja mengambil tindakan yang

13

sepadan Resoloesi”. Hal ini sebagai upaya untuk menyebarkan paham untuk mempertahankan kemerdekaan

di daerah-daerah Indonesia. Pertimbangan para ulama NU

¹²Zainul Milal Bizawie, op.cit.,
Museum Nahdlatul
Ulama

Surabaya, Naskah Resolusi Jihad 1945.

hlm. 208

¹³“Toentoetan Nahdlatol
Oelama”, Kedaulatan Rakjat, 26
November 1945.

mengeluarkan Resolusi Jihad didasarkan pada hasrat umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, selain itu upaya mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia dalam pandangan hukum Islam merupakan bagian dari kewajiban agama yang harus dijalankan umat Islam. Dalam penilaian pandangan para ulama dan umat Islam, tindakan yang dilakukan Inggris dan NICA setelah kemerdekaan telah banyak mengganggu ketertiban terkait dengan kejahatan dan kekejaman yang telah dilakukan terhadap rakyat Indonesia, maka keluarlah hukum yang mengharuskan setiap orang untuk berperangan dan sifat perang tersebut adalah jihad fisabilillah.¹⁴

Resolusi Jihad ini mewakili sikap sebagian besar bangsa Indonesia, bahwa tindakan NICA dan Inggris merupakan tindakan yang telah melanggar kedaulatan negara dan agama. Maka dalam keadaan seperti ini umat Islam memiliki kewajiban untuk melakukan pembelaan.¹⁵

¹⁴ Zainul Milal Bizawie, loc.cit.

¹⁵ Ibid.

D. Peranan Ulama dan Santri dalam Mempertahankan Kemerdekaan NKRI

Upaya yang dilakukan para ulama untuk mempertahankan kemerdekaan NKRI adalah membentuk sebuah laskar militer, tujuannya membendung pasukan sekutu dan NICA yang masuk ke Indonesia waktu itu. Pembentukan Laskar Hizbullah-Sabilillah diawali ketika Jepang mulai memobilisasi para pemuda Indonesia untuk bergabung menjadi Heiho (pembantu tentara) guna kepentingan perang pasifik. Dari perekrutan Heiho, Jepang memperoleh jumlah 42.500 orang, itu merupakan jumlah yang sangat besar. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut Jepang masih membutuhkan pasukan lebih banyak lagi. Oleh karena itu pada 3 Oktober 1943 Saiko Sikikan dari tentara pendudukan Jepang mengeluarkan Osamu Seirei No. 44 tentang pembentukan Tentara Sukarela Tanah Air (PETA). Pengumuman pembentukan PETA tersebut disambut antusias oleh para pemuda Indonesia. Dari pembentukan PETA ini terkumpul

38.000 orang menjadi anggota PETA, yang terdiri dari 65 daidan (batalyon) di Jawa dan tiga Daidan di Bali.¹⁶

Kenyataan dengan banyaknya kekuatan Islam di dalam militer bentukan Jepang membuat beberapa ulama memanfaatkan kesempatan ini untuk menyampaikan usulan mengenai pembentukan barisan sukarelawan bagi umat Islam yang terdiri dari pemuda-pemuda Islam. Diantara ulama yang mengusulkan pembentukan barisan sukarelawan bagi umat Islam adalah dari tokoh Masyumi yaitu K.H. Mas Mansur, Moh. Adnan, H. Abdul Karim Amrullah, H.Cholid, K.H. Abdul Majid, H. Ya'kub, K.H. Junaidi, H. Moh Sadri, H. Mansur, Muhammad Natsir, dan K.H. Wahid Hasyim. Kemudian pada 13 September 1943 para ulama ini datang ke kantor Gunseikanbu untuk menyampaikan surat kepada Saiko Sikikan.¹⁷

¹⁶Isno El-Kayyis, *Perjuangan laskar Hizbullah di Jawa Timur*, (Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2015), hlm. 29.

¹⁷ Tashadi, dkk, *Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang*, (Surakarta: Yayasan Bhakti Utama, 1977), hlm. 29.

Dengan semakin berkurangnya personil pasukan Jepang maka untuk mempertahankan Indonesia dari kemungkinan serbuan musuh sudah tidak mungkin lagi dilakukan oleh pasukan reguler. Satu-satunya cara adalah dengan menyertakan keterlibatan kekuatan lokal yang sebelumnya telah mendapatkan berbagai latihan kemiliteran. Namun kualitas dan kuantitas dari garda pertahanan yang dikerahkan itu akan semakin menguat jika Jepang juga mempertimbangkan potensi yang dimiliki kelompok Islam.¹⁸ maka pada 14 Oktober 1944 pemerintah militer Jepang menyetujui usulan untuk membentuk kesatuan semi militer dari kalangan Islam. Tidak seperti halnya dalam menyikapi usulan dari kalangan Nasionalis, ketika Jepang menyatakan persetujuannya terhadap pembentukan barisan sukarela dari kelompok Islam, maka tidak serta-merta melakukan langkah-langkah kongkrit untuk merealisasikannya. Dua bulan kemudian, pada 8 Desember 1944 pemerintah militer Jepang secara resmi mengumumkan tentang dibentuknya

¹⁸ Ibid.

pasukan sukarela Islam khusus atau yang dikenal dengan Hizbullah.¹⁹

Latihan bagi anggota Hizbullah dilakukan di Cibarusa, Bogor, tercatat diikuti 500 orang pemuda muslim dari Jawa dan Madura. Di antara utusan pemuda muslim tersebut, tercatat sejumlah nama kyai muda dari pondok pesantren seperti K.H. Mustofa Kamil (Banten), K.H. Mawardi (Solo), Kyai Zarkasi (Ponorogo), Kyai Mursyid (Pacitan), Kyai Syahid (Kediri), Kyai Abdul Halim (Majalengka), Kyai Thohir Dasuki (Surakarta), Kyai Roji'un (Jakarta), Kyai Munasir Ali (Mojokerto), Kyai Abdullah Kyai Wahib Wahab (Jombang), Kyai Hasyim Latif (Surabaya), Kyai Zainudin (Besuki), Sulthan Fajar (Jember), K.H. Abdullah Abbas (Cirebon), dan lain-lain.²⁰

Adapun Sabilillah yang pusatnya di Malang munculnya lebih belakangan dari Hizbullah. Prakarsa untuk mendirikan munculkan pada waktu kongres pertama Masyumi yang diadakan di Yogyakarta sesudah

proklamasi yang berlangsung pada tanggal 7-8 November 1945. Kongres itu memutuskan bahwa Masyumi memerlukan badan perjuangan di luar kesatuan-kesatuan Hizbullah yang bersifat militer untuk memobilisasi penduduk yang beragama Islam secara umum. Adapun pengurus barisan Sabilillah yaitu K.H. Masykur dan W. Wondoamiseno tokoh masyumi pusat.²¹

Petunjuk teknis tentang pembentukan dan struktur organisasi Laskar Sabilillah pada tingkat pusat dan daerah adalah sebagai berikut:

BARISAN SABILILLAH
Oentoek mendjalankan kepoatoesan Kongres Oemmat Islam Indonesia di Jogjakarta pada tg, 1-2 Zoelhidjah 1364 (7-8/11-'45) dalam mana ditegaskan, bahwa:

1. Memperkoeat persiapan Oemmat Islam oentoek berdjihad fi Sabilillah.
2. Memperkoeat pertahanan Negara Indonesia dengan berbagai oesaha, maka disoesoenlah soeatu barisan jg diberi nama: Barisan Sabilillah, dibawah pengawasan Masjoemi, jg peratoerannja sbb:
 1. Hal Anggota:
Jang menjadi anggota Barisan ini adalah Oemat Islam.
 2. Hal Pimpinan:

¹⁹Ibid.

²⁰Isno El-Kayyis, op.cit., hlm.

²¹ Tashadi, dkk, op.cit., hlm. 36.

Poesat Pimpinan Barisan ini bernama: Markas Besar Sabilillah; jang terdiri dari 5 orang, antaranja seorang ahli siasah, 2 orang ahli Agama dan 2 orang ahli peperangan.

Ditiap-tiap daerah diadakan Markas Sabilillah Daerah. Ialah Djawa Timoer, Djawa Tengah dan Djawa Barat jang masing-masing terdiri dari 9 orang.

Ditiap-tiap karesidenan diadakan Markas Sabilillah Karesidenan, jang masing2 terdiri dari 7 orang.

Ditiap-tiap kabupaten diadakan Markas Sabilillah Kabupaten, jang masing2 terdiri dari 5 orang.

Barisan ini adalah mendjadi barisan istimewa dari pada Tentara Keamanan Rakjat (T.K.R.).²²

Para ulama yang bergabung dalam kesatuan militer tersebut mendapat peran yang sangat penting di dalamnya. Sebagaimana diketahui, sebagian besar tentara PETA, dari enam puluh bataliyon, hampir separuh komandannya adalah para ulama atau

kyai. Sementara untuk posisi penasihat PETA dipilihlah K.H. Hasyim Asy'ari, pendiri NU dan pendiri pesantren Tebu Ireng Jombang. Sebagai penasihat PETA K.H. Hasyim Asy'ari berhasil menanamkan ruh jihad di tiap dada prajurit-prajurit. Kyai Hasyim selalu menanamkan pada prajurit-prajurit PETA bahwa tujuannya adalah berperang di jalan Allah. Tak heran, umat Islam menyambutnya dengan gairah tinggi. Umat berharap, kehadiran PETA dapat menjadi batu loncatan menuju Indonesia merdeka.²³

Peran penting lainnya yang dijabat oleh ulama adalah pada pucuk pimpinan laskar Hizbullah dan Sabillilah. Pada laskar Hizbullah posisi panglima di jabat oleh K.H. Zaenul Arifin, sedangkan pada laskar Sabillilah posisi panglima di jabat oleh K.H. Masjkur. Betapa pentingnya peran ulama-ulama tersebut untuk kemerdekaan bangsa ini dari fatwa dan wejangan mereka mampu menjadi energi penggerak kekuatan masa. Wajar jika gerakan melawan penjajah

²²"60 Mijoen Kaoem Moeslimin Indonesia Siap Berdjihad Fi Sabilillah" Kedaulatan Rakjat, 9 Nopember 1945.

²³Najib Jauhari, "Resolusi Jihad dan Laskar Sabilillah Malang Dalam Pertempuran Surabaya 10 Nopember 1945", dalam Jurnal Studi Sosial (Vol. 5, No. 2, 2013), hlm. 44.

dan musuh-musuh rakyat, ulama menjadi pemimpin di garda depan. Hal tersebut semakin membuktikan bahwa peran para ulama dalam masa perjuangan nasional sangat besar.

Peran penting para ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI semakin terlihat ketika perang 10 November 1945 di Surabaya, hal ini terlihat ketika Para kyai berduyun-duyun mengirimkan para santri untuk bergabung dengan Hizbullah, Sabilillah, dan badan-badan perjuangan lain. Bahkan tidak hanya datang dari kawasan Jawa Timur saja, tetapi cukup banyak kesatuan Hizbullah, laskar-laskar, dan para santri dari pesantren-pesantren di Jawa Tengah dan Jawa Barat turut hadir dan memperkuat barisan pertahanan para pejuang di Surabaya.

Perang 10 November mulai meletus ketika Brigjen Mallaby tewas tertembak dan mobil yang dikendarainya terbakar. Kematian

Mallaby membangkitkan kemarahan dari pihak Inggris, selain kemarahan yang timbul mereka juga menanggung rasa malu karena telah kehilangan perwira terbaiknya. Kemudian Panglima AFNEI Letjen Philip

Christison pada 31 Oktober 1945 mengeluarkan ancamannya, jika orang-orang Indonesia yang telah melakukan serangan tidak menyerahkan diri maka sebagai pimpinan tertinggi pasukan Inggris di Indonesia akan mengerahkan seluruh kekuatan militer darat, laut, dan udara serta semua persenjataan modern untuk menyerang pihak Indonesia hingga hancur.²⁴

Memasuki bulan November warga kota Surabaya diliputi suasana ketidakpastian oleh adanya ancaman Jenderal Christison. Sebagian orang menafsirkan bahwa ancaman itu hanya gertak sambal dan yang lain menganggapnya serius. Tetapi semua warga kota tetap siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga suasana benar-benar menjadi tegang.²⁵

Pada tanggal 7 November, Mansergh menulis surat kepada Gubernur Soeryo, yang isinya ia menuduh bahwa gubernur tidak bisa

²⁴Sutomo, *Pertempuran 10 november 1945, Kesaksian dan Pengalaman Seorang Aktor Sejarah*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 113.

²⁵Isno El-Kayyis, *op.cit.*, hlm. 180.

menguasai keadaan, seluruh kota telah dikuasai oleh para perampok. Mereka menghalang-halangi tugas Serikat. Akhirnya ia mengancam bahwa ia akan menduduki kota Surabaya untuk melucuti "gerombolan yang tidak mengenal tertib hukum" itu. Serta "memanggil" Gubernur Soeryo untuk menghadap.

Dalam surat jawabannya tanggal 9 November 1945 Gubernur Soeryo membantah semua tuduhan Mansergh. Gubernur Soeryo mengutus Residen Sudirman dan Roeslan Abdulgani untuk menyampaikan suratnya. Surat tersebut akhirnya dibalas oleh Inggris dengan dua surat yang salah satu isi suratnya adalah ultimatum kepada bangsa Indonesia di Surabaya. Ultimatum itu tertanggal 9 November 1945. Ultimatum itu isi dan maknanya dirasakan menghina martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Isi pokoknya adalah pihak Inggris ingin membalas kematian Mallaby yang dianggap sebagai tanggung jawab rakyat Surabaya. Ultimatum disertai "instruksi" yang menuntut bahwa semua pemimpin Indonesia, pemimpin pemuda, kepala polisi, kepala pemerintah, harus

melapor pada tempat dan waktu yang ditentukan dengan meletakkan tangan mereka di atas kepala, dan kemudian menandatangani dokumen yang disediakan sebagai tanda menyerah tanpa syarat.²⁶ Ultimatum yang berisi ancaman tersebut disebarkan oleh pihak Inggris melalui pamflet melalui pesawat terbang ke seluruh penjuru Surabaya.

Akhirnya Perang besar pun pecah pada 10 November 1945. Dalam pengerahan dan penyerangan terhadap Surabaya ini pihak Inggris menyatakan bahwa pengerahan kekuatan militernya saat itu adalah yang terbesar setelah Perang Dunia II. Jumlah pasukan yang dikerahkan sebanyak 10.000 personil hingga 15.000 personil. Dari arah laut dibantu dengan tembakan-tembakan meriam kapal penjelajak Sussex dan beberapa kapal perusak. Selain itu, beberapa pesawat tempur Royal Air Forces (RAF) atau Angkatan Udara Inggris juga dikerahkan untuk melakukan bombardemen dan

²⁶Marwati Djoened, dkk, Sejarah Nasional Indonesia V, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 114.

tembakan-tembakan dari udara terhadap kota Surabaya.²⁷

Hampir kurang lebih tiga jam pasukan Inggris melakukan ofensif dan aktif dalam serangan pertama. Baru pada pukul 09.00 pihak komando pertempuran Surabaya mengeluarkan perintah untuk melakukan serangan balasan. Tembakan-tembakan dari mobil lapis baja yang dimiliki pihak Republik bertempur dengan tank-tank modern pasukan Inggris. Sementara satuan tempur dari unsur TKR, Polisi, Hizbullah, PRI, dan lainnya merangsek ke arah kolone-kolone dan posisi pasukan Inggris sehingga menimbulkan korban yang cukup banyak pada kedua pihak.²⁸

Pada 24-25 November 1945 pasukan Inggris akhirnya menguasai seluruh kota Surabaya atau setelah dua minggu penuh bertempur tanpa henti. Keberhasilan ini juga

²⁷A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2 Diplomasi atau Bertempur*, (Bandung: Penerbit Angkasa & Disjarah AD, 1977), hlm.99.

²⁸Imam Sudjono, *Yang Berlawan (Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI)*, (Yogyakarta: Resist Book, 2006), hlm. 380.

bukan dikarenakan para pejuang Republik berhasil dihancurkan, namun lebih karena adanya himbauan pimpinan perlawanan untuk mengundurkan diri selain menghindari jumlah korban yang tidak perlu, juga ditujukan untuk mengatur lagi strategi perlawanan. Untuk itu, dibentuk Markas Pimpinan Perjuangan yang berpusat di Mojokerto yang melahirkan Dewan Perjuangan Rakyat Surabaya. Dewan ini yang mengatur koordinasi tiga front pertempuran, utara, tengah, dan selatan.²⁹

Meski pasukan Inggris berhasil menduduki Surabaya, sebenarnya tidak banyak yang diperolehnya dari keberhasilan penguasaan kota dan mundurnya para pejuang Surabaya. Terhitung bahwa hanya sekitar 1.100 pucuk senapan, 100 pucuk senapan mesin, dan 24 artileri penangkis serangan udara dari pihak Republik yang jatuh ke tangan pasukan Inggris. Jumlah seperti ini terhitung hanya sebagian jumlah kecil dari keseluruhan senjata yang masih dimiliki kesatuan

²⁹Ibid., hlm. 234.

TKR dan badan-badan perjuangan di Surabaya dan sekitarnya.³⁰

E. Kesimpulan

Munculnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 erat kaitannya dengan kedatangan pasukan sekutu (Inggris) ke Indonesia yang tujuan awalnya adalah melucuti senjata tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II dan memulangkan mereka ke negara asal mereka yaitu ke Jepang, namun ternyata pasukan sekutu yang dalam hal ini adalah pasukan AFNEI (Allied Forces Netherlands East Indies) secara diam-diam membawa serta pasukan NICA (Belanda), maka timbullah rasa curiga dan tidak percaya pada pasukan sekutu, karena memang NICA atau Belanda masih mempunyai keinginan untuk berkuasa kembali di Indonesia.

Resolusi yang diserukan langsung oleh K.H. Hasyim Asy'ari berisi perintah untuk berjuang mempertahankan tegaknya Republik Indonesia yang sifatnya jihad fi sabilillah serta mempunyai hukumnya fardhu 'ain atau wajib bagi setiap

orang Islam di Indonesia, mempunyai dampak yang sangat luar biasa, hal ini terlihat dari penguatan kembali laskar Hizbullah yang dibentuk pada zaman Jepang dan pembentukan laskar militer seperti laskar Sabilillah. Selain itu para kyai atau ulama kemudian mengirimkan para santrinya untuk bergabung dengan laskar militer seperti Hizbullah dan Sabilillah untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Guna mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia maka para ulama bersama para santrinya ikut angkat senjata dalam organisasi kemiliteran, baik dalam laskar Hizboellah, Sabillillah bersama BKR, TKR, TRI dan TNI selama perang kemerdekaan 1945-1950, melawan Tentara Sekutu Inggris dan NICA. Dan banyak dari para ulama menjadi tokoh sentral baik dalam kepemimpinan laskar militer ataupun sebagai penggerak santri atau masyarakat untuk ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

³⁰ Hario Kecik, *Otobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit, Memoar Hario Kecik*, (Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002), hlm. 215.

Daftar Pustaka

Arsip

Museum Nahdlatul Ulama, Naskah Resolusi Jihad NU Tahun 1945, Surabaya, Jawa Timur, 1945.

Buku

Abdul Latif Bustami dan Tim Sejarahwan Tebuireng, Resolusi Jihad perjuangan Ulama: dari Menegakkan Agama Hingga Negara, Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2015.

Gugun El-Guyanie, Resolusi Jihad Paling Syar'i, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010.

Hario Kecik, Otobiografi Seorang Mahasiswa Prajurit, Memoar Hario Kecik, Jakarta: Pustaka Utan Kayu, 2002.

Imam Sudjono, Yang Berlawan (Membongkar Tabir Pemalsuan Sejarah PKI), Yogyakarta: Resist Book, 2006.

Isno El-Kayyis, Perjuangan laskar Hizbullah di Jawa Timur, Jawa Timur: Pustaka Tebuireng, 2015.

Marwati Djoened, dkk, Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Moedjanto, G., Sejarah Indonesia Abad ke-20 Jilid I dari Kebangkitan Nasional sampai Linggarjati, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1974.

Nasution, A.H., Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2 Diplomasi atau Bertempur, Bandung: Penerbit Angkasa & Disjarah AD, 1977.

Saleh, R.H.A., Mari Bung, rebut Kembali, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.

Sutomo, Pertempuran 10 november 1945, Kesaksian dan Pengalaman Seorang Aktor Sejarah, Jakarta: Visimedia, 2008.

Tashadi, dkk, Sejarah Perjuangan Hizbullah Sabilillah Divisi Sunan Bonang, Surakarta: Yayasan Bhakti Utama, 1977.

Zainul Milal Bizawie, Laskar Ulama-Santri & Resolusi Jihad Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949), Jakarta: Pustaka Kompas, 2014.

Jurnal

Najib Jauhari, "Resolusi Jihad dan Laskar Sabilillah Malang Dalam Pertempuran Surabaya 10 Nopember 1945", dalam *Jurnal Studi Sosial* (Vol. 5, No. 2, 2013), hlm. 71.

Koran

Kedaulatan Rakjat, 26 Oktober 1945.

Kedaulatan Rakjat, 9 Nopember 1945.